

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PELAKSANAAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN  
PELALAWAN  
(Studi Di Kecamatan Ukui)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Yessi Supriana  
NPM : 177310608**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Yessi Supriana  
NPM : 177310608  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah  
pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan  
(Studi di Kecamatan Ukui)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

Pekanbaru, Maret 2021  
Pembimbing

**Andriyus, S.Sos., M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Yessi Supriana  
NPM : 177310608  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi di Kecamatan Ukui)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 02 Juli 2021

Ketua

  
**Andriyus, S.Sos., M.Si**

Sekretaris

  
**Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP**

Anggota

  
**Nina Yuslimi, S.IP., M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan I

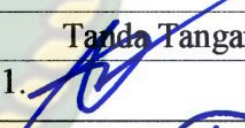


  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

## UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor *963* /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 09 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 10 Juni 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Yessi Supriana  
 NPM : 177310608  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
 Judul Skripsi : ***Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Kecamatan Ukui).***  
 Nilai Ujian : Angka : ” 81.43 ” ; Huruf : ” A-”  
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus, S.sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Nina Yuslaini, S.IP., M.Si	Anggota	3. 

Pekanbaru, 10 Juni 2021

An. Dekan,

**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**

Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 927/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA.**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
 5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- ditetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Yessi Supriana  
 N P M : 177310608  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
 Judul Skripsi : ***Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Kecamatan Ukui).***

Struktur Tim :

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Andriyus, S.Sos., M.Si..       | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Nina Yuslaini, S.IP., M.Si.    | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 09 Juni 2021  
 Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

Salinan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR  
 2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR  
 3. Yth. Ketua Prodi.....  
 A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Yessi Supriana  
 NPM : 177310608  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi di Kecamatan Ukui)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 01 Juli 2021

An. Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua,

  
Andriyus, S.Sos., M.Si

  
Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bidang Akademik

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui  
Ketua Program Studi,

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi di Kecamatan Ukui)” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau.

6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan beserta pegawai yang telah bersedia memberikan data awal dan meluangkan waktunya untuk pengumpulan data penyusunan skripsi ini.
7. Pengusaha UKM di Kecamatan Ukui yang telah bersedia meluangkan waktu dalam pengumpulan data penelitian penyusunan Skripsi ini.
8. Buat Ibunda dan Alm. Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, Maret 2021

Ttd

**Yessi Supriana**  
**NPM: 177310608**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitian.....	13
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	15
A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Pemerintahan.....	15
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	21
3. Konsep Otonomi Daerah.....	23
4. Konsep Pembinaan.....	26
5. Konsep Usaha Kecil dan Menengah.....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Pikir.....	30
D. Konsep Operasional.....	32
E. Operasionalisasi Variabel.....	33
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	34
A. Tipe Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Informan Penelitian.....	35
D. Teknik Penetapan Informan.....	36
E. Jenis dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Jadwal Penelitian.....	40
I. Rencana Sistematisa Penulisan Skripsi.....	37

<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	42
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan .....	42
B. Gambaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan .....	44
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	51
A. Identitas Informan .....	51
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	56
1. Tindakan.....	57
2. Proses .....	68
3. Evaluasi.....	81
C. Hambatan dan Pendukung Pembinaan Yang Dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan .....	89
<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	95
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran-saran.....	95
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	97

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Pelalawan .....	7
I.2 Industri Usaha kecil dan Menengah di Kecamatan Ukui.....	8
I.3 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan UKM.....	9
I.4 Rencana Anggaran Pembinaan UKM di Kabupaten Pelalawan	
I.5 Jenis Pembinaan yang Diterima UKM Ukui .....	11
I.6 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan UKM.....	12
II.1 Penelitian Terdahulu .....	29
II.2 Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Di Kecamatan Ukui).....	33
III.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Di Kecamatan Ukui).....	41
IV.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Ukui .....	
V.1 Identitas Informan Penelitian .....	51

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar		Halaman
I.1	Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Di Kecamatan Ukui).....	31
III.1	Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	38
IV.1	Struktur Organisasi .....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Jawaban Informan
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yessi Supriana  
 NPM : 177310608  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi di Kecamatan Ukui)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2021  
Pelaku Pernyataan,



**Yessi Supriana**  
**NPM: 177310608**

**ABSTRAK****PELAKSANAAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PELALAWAN  
(Studi Di Kecamatan Ukui)**

Oleh:

**Yessi Supriana**  
NPM: 177310608**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Pembinaan, UKM

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Di Kecamatan Ukui. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Di Kecamatan Ukui. Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh langsung dari informan penelitian sesuai permasalahan penelitian dan data primer yang mendukung. Kemudian pengumpulan data yang dilakukan dengan langkah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Di Kecamatan Ukui) sudah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada seperti alokasi anggaran dan program kerja. Di mana dalam pembinaan telah ditetapkan tindakan, dan proses pembinaan, serta adanya evaluasi atas pembinaan yang telah dijalani. Hambatan pembinaan UKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan berupa minat dan inovasi pelaku usaha, fasilitas pendukung pelaku usaha.

## ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT  
 IN THE DEPARTMENT OF COOPERATION, SMALL AND MEDIUM  
 ENTERPRISES, INDUSTRY AND TRADE  
 PELALAWAN REGENCY  
 (Study in Ukui District)

By:

Yessi Supriana  
 NPM: 177310608

*Keywords: Implementation, Development, UKM*

*The purpose of this study was to determine the Implementation of Small and Medium Enterprises Development at the Cooperative, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade Office of Pelalawan Regency in Ukui District. To find out the Inhibiting and Supporting Factors for the Implementation of Small and Medium Business Development at the Cooperative, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade Office of Pelalawan Regency in Ukui District. This type of research is qualitative with a descriptive approach, data obtained directly from research informants according to research problems and supporting primary data. Then data collection was carried out by means of observation, interviews, and documentation. All data collected were classified according to type and form and then presented descriptively. The results of the study concluded that the Development of Small and Medium Enterprises at the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade of Pelalawan Regency (Study in Ukui District) has been implemented in accordance with existing capabilities such as budget allocations and work programs. Where in coaching the actions and processes of coaching have been determined, as well as an evaluation of the coaching that has been undertaken. Barriers to fostering SMEs by the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade of Pelalawan Regency are interests and innovations of business actors, supporting facilities for business actors.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Tujuan Negara Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Sejalan dengan arus reformasi yang telah digulirkan dengan harapan agar aparatur pemerintah dapat mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara, dengan menerapkan pengawasan dan pelayanan kepada publik.

Kedudukan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 tentang pemerintahan daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Selanjutnya dalam ayat 15 dikatakan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. Tenaga kerja;
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan informatika;
  - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;**
  - l. Penanaman modal;
  - m. Kepemudaan dan olah raga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;
  - p. Kebudayaan;
  - q. Perpustakaan; dan
  - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;
  - d. Kehutanan;
  - e. Energi dan sumber daya mineral;
  - f. Perdagangan;
  - g. Perindustrian; dan
  - h. Transmigrasi.

Pemerintahan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai penyelenggaraan desentralisasi di daerah pada bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah. Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu penggerak roda perekonomian yang diusahakan masyarakat. Untuk itu bidang ini perlu mendapat

perhatian melalui pembinaan agar terbentuknya koperasi, usaha kecil dan menengah yang berkompeten.

Penyelenggaraan penetapan peraturan yang didasarkan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah berhak untuk melaksanakan segala urusannya dengan seluas-luasnya, dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah pusat memberikan pedoman melalui peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang ada, yang kemudian dimanifestasikan sendiri oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Kabupaten Pelalawan memiliki luas kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2014 adalah 386.428 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 203.683 jiwa dan perempuan 182.745 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 101.268 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.604 jiwa.

Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dalam koperasi, usaha kecil dan menengah, maka Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Dimana untuk melaksanakan kewenangan wajib atas penanganan koperasi dan UMKM maka pemerintah Kabupaten pelalawan membentuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan umum di bidang tersebut.

Untuk menjalankan tugas tersebut, maka disusunlah Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Bidang yang menangani masalah UKM yakni Bidang UMKM yang terdiri dari

- a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM;
- b. Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM;
- c. Seksi Sarana Prasarana UMKM.

Sementara tugas dan fungsi Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menghimpun dan menginventerisasi serta mengumpulkan dan mengelola data usaha mikro kecil menengah pemasaran produk usaha mikro, menjabarkan dan menyusun pedoman teknis pemberdayaan usaha mikro menengah akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan usaha mikro fasilitasi informasi usaha kesempatan berusaha dan dukungan bagi usaha mikro kecil menengah;
- c. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi pengembangan dan pembinaan usaha mikro kecil menengah secara rutin maupun berkala;
- d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

- e. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM;
- g. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang UMKM sesuai dengan bidang tugasnya.

Hal ini dikarenakan usaha kecil dan menengah merupakan salah satu jenis usaha yang bermodal kecil dan sangat banyak digeluti masyarakat sebagai penopang kehidupan. Usaha kecil dan menengah menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat, tentunya dibutuhkan kemampuan pengelolaan usaha yang baik. Sebagaimana diketahui bahwa banyak usaha yang buka tutup dikarenakan kurangnya kemampuan dalam mengelola usaha dan tidak kuat bersaing dengan usaha sejenis serta faktor lainnya.

Usaha kecil dan menengah yang diusahakan masyarakat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah daerah berupa pemberian pembinaan dan pembukaan akses permodalan, sehingga usaha yang dijalani masyarakat bisa berkembang dan maju yang berujung pada meningkatnya perekonomian masyarakat.

Di Kabupaten Pelalawan banyak terdapat usaha kecil dan menengah dengan berbagai jenis usaha dan kategorinya. Pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada usaha kecil dan menengah pada bidang industri kecil dan menengah. Data industri usaha kecil dan menengah di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel I.1 Industri Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan	Jenis Industri Kecil dan Menengah									Jumlah
		Pangan	Kerajinan	Tekstil	Farmasi / Kimia	Logam / Baja	Pengolahan Kayu	Peralatan / Mesin	Alat Angkut	Batu Bata	
1	Pangkalan Kerinci	139	95	74	4	10	13	3	0	6	344
2	Langgam	22	11	4	0	4	4	1	4	1	51
3	Pangkalan Kuras	33	102	4	2	11	3	0	0	0	157
4	Bandar Petalangan	14	1	0	0	0	1	0	0	1	17
5	Pangkalan Lesung	69	46	24	1	1	16	1	0	0	158
<b>6</b>	<b>Ukui</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
7	Bunut	8	11	5	0	0	0	0	0	0	24
8	Kuala Kampar	32	83	3	0	0	3	0	11	0	132
9	Teluk Meranti	9	11	4	0	0	0	0	0	0	24
10	Kerumutan	10	3	0	0	0	6	0	0	0	19
11	Pelalawan	2	0	1	0	0	0	0	1	0	4
12	Bandar Seikijang	8	0	0	0	0	0	2	0	0	10
Jumlah		396	378	128	7	20	62	14	16	8	1.029

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, 2020.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, menggambarkan bahwa terdapat 1.029 industri kecil dan menengah yang terdapat di Kabupaten Pelalawan dengan berbagai jenis atau kategori usaha. Di mana salah satu kecamatan yang terdapat jenis usaha kecil dan menengah yang tergolong dalam industri kecil dan menengah adalah Kecamatan Ukui dengan jumlah keseluruhan 89 unit usaha.

Berdasarkan data di atas, maka dapat dijelaskan lagi kategori usaha kecil dan menengah yang ada di Kecamatan Ukui. Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian kategori kecil dan menengah ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2 Industri Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Uku

No	Kategori	Jenis Industri									Jumlah
		Pangan	Kerajinan	Tekstil	Farmasi / Kimia	Logam / Baja	Pengolahan Kayu	Peralatan / Mesin	Alat Angkut	Batu Bata	
1	Usaha Kecil	48	12	2	0	0	0	0	0	0	62
2	Usaha Menengah	2	3	7	0	3	8	4	0	0	27
	Jumlah	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, 2020.

Data yang tertuang pada tabel di atas, menjelaskan bahwa dari 89 unit usaha ini terdapat 62 usaha tergolong kecil dan 27 usaha tergolong usaha menengah. Di mana pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pembinaan usaha kecil yang kebanyakan usaha rumah tangga dalam pengolahan pangan. Dengan demikian penelitian ini lebih terfokus pada pembinaan usaha kecil pada bidang pengolahan pangan yang ada di Kecamatan Uku.

UKM bidang pengolahan pangan pada penelitian adalah usaha yang mengolah berbagai sumber bahan baku untuk dijadikan makanan seperti produksi tahu, produksi tempe, pembuatan kerupuk, pembuatan keripik, pembuatan roti, pembuatan kue, dan jenis lainnya. Hal ini dikarenakan usaha kecil merupakan usaha rumahan yang pantas untuk dibina dikarenakan sangat membantu perekonomian dalam rumah tangga, sehingga dengan adanya pembinaan dari pemerintah akan meningkatkan kualitas usaha sehingga mendukung perekonomian.

Dengan demikian jelaslah bahwa UKM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pemerintah untuk memberdayakan dan membina

pengusaha kecil dan menengah sebagai penopang perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah. Dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, maka ditetapkan dan dilaksanakan berbagai program kerja untuk membina dan mengembangkan UMKM sebagai berikut:

Tabel I.3 Jenis Pembinaan UKM di Kabupaten Pelalawan

No	Program Kerja	Jenis	Kegiatan	Jumlah Peserta		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	Pelatihan kemitraan usaha bagi UMKM		25	20
		Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Pelatihan kewirausahaan			15
		Teknopreneurship Camp (Menumbuh Kembangkan Wirausaha Baru)	Pelatihan Teknopreneurship Camp (Menumbuh Kembangkan Wirausaha Baru)		15	
			Pelatihan Teknopreneurship Camp (Menumbuh Kembangkan Wirausaha Baru)			15
		Pelatihan Ketrampilan Kerajinan	Pelatihan Tenun		10	10
		Pengembangan Usaha Ekonomi dalam Pemantapan Sentra UKM	Pelatihan Pengolahan Tepung Alga		35	
			Pelatihan Pengolahan Ikan			4 (40)
		Temu Usaha KUMKM dengan Dunia Usaha	Pelatihan Temu Usaha KUMKM dengan dunia usaha		25	20
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan Bagi IKM dalam Pengembangan Klaster Industri Integrasi Sapi Sawit	Pelatihan Pupuk Organik		15	30

1	2	3	4	5	6	7
		Pencapaian Standarisasi Penerapan IKM	Standarisasi dan Uji Kompetensi Pengelasan		8	10
		Pembinaan dan Monitoring IKM	Pelatihan dan Magang Rajut	7	8	12
		Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kreatif dalam Mendukung Klaster Industri Pariwisata	Pelatihan Menjahit	30		
			Pelatihan Makanan dan Minuman	40		
			Pelatihan Membuat dan Menghias Kue		55	
			Pelatihan Rajut		15	
			Pelatihan Quilting			20
			Pengembangan Industri Hilir Perkebunan / Pertanian	Pelatihan Pembuatan Kecap dari Air Kelapa		20
			Pelatihan Anyaman Lidi Sawit			35
		Kerjasama Kemitraan Industri Kecil dan Menengah dengan Swast	Menjalin Kerjasama IKM dengan Perusahaan Swasta		25	21
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri	Pelatihan Kerajinan Rajut	50		
			Pelatihan Anyaman Pandan			30
			Pelatihan Rajut			30
Total				127	256	268

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. 2020.

Data yang ditampilkan di atas jelaslah bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan 3 program kerja yang di dalam program tersebut terbagi atas beberapa jenis

kegiatan dengan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat UKM yang ada di seluruh Kabupaten Pelalawan selama tahun 2017-2019 sebanyak 651 orang dan kelompok.

Berbagai program yang telah ditetapkan pada tabel di atas, maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan telah menetapkan besaran rencana anggaran untuk melaksanakan program tersebut. Adapun besaran anggaran yang dibutuhkan yakni:

Tabel I.4 Rencana Anggaran Pembinaan UKM di Kabupaten Pelalawan

No	Tahun	Besar Anggaran (Rupiah)
1	2017	1.428.715.0000
2	2018	1.126.820.000
3	2019	1.162.934.0000

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. 2020.

Data yang ditampilkan pada tabel 1.3 dan 1.4 jelas menggambarkan bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan telah menetapkan berbagai program pembinaan untuk UKM dan menetapkan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pembinaan. Dengan demikian jelas bahwa telah ada program dan besaran dana yang ditetapkan untuk melakukan pembinaan terhadap UKM.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa fenomena yang terlihat sebagai berikut :

1. Masih sedikit UKM yang terdapat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang memperoleh pembinaan dari pemerintah. Di mana

Industri Usaha Kecil dan Menengah yang berjumlah 89 unit, yang baru mendapatkan pembinaan dari tahun 2017-2019 hanya berjumlah 41 unit usaha. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.5 Jenis Pembinaan Yang Diterima UKM Ukui

No.	Kegiatan Pembinaan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Pelatihan pupuk organik	-	-	30
2	Standarisasi dan uji kompetensi	-	-	3
3	Sertifikasi halal	-	2	1
4	Menjalani kerja sama IKM dengan perusahaan swasta	-	5	-
Jumlah		-	7	34

Perlunya pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah ini, dikarenakan usaha-usaha ini mampu memberikan sumbangan perekonomian keluarga dan juga bisa membuka kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakat. Hal ini tentu sangat penting untuk diperhatikan dan perlu perhatian pemerintah dalam usaha menjejahterakan masyarakat.

2. Diindikasikan belum efisiennya pembinaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap UKM di Kecamatan Ukui. Dikarenakan masih sedikitnya program pembinaan yang dimiliki Dinas.

Tabel I.6 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan UKM

Kegiatan	Anggaran APBD Murni	Anggaran APBD Perubahan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp. 856.022.000	Rp.306.912.000
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp. 337.020.000	Rp. 0

Sumber: LKJ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan 2020

Dari beberapa fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Di Kecamatan Ukui)”

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Di Kecamatan Ukui.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Di Kecamatan Ukui.

- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Di Kecamatan Ukui.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut;

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

- b. Kegunaan Akademis

Bagi para akademisi penelitian ini sebagai pengetahuan dan informasi guna menciptakan pembinaan usaha kecil dan menengah.

- c. Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah daerah dapat dijadikan sumber rujukan dalam pembinaan Usaha Kecil dan Menengah serta dapat dijadikan sebagai referensi akan pentingnya meningkatkan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup ;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Sedarmayanti, 2004;56)

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper dalam Labolo (2015; 18), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi

ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, dalam Labolo, 2015). Bagian terakhir dari pembedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimlisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadari dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadari diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah (Kuper dalam Labolo 2015; 19).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas

pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper dalam Labolo (2015;19), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2015;20)

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan

pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000;13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui tugas-tugas pokok pemerintahan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara. Selanjutnya Strong dalam Syafiie (2005;22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus

mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2000;59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Ndraha (2011;85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, menurut Rasyid (2000;59), menyatakan bahwa fungsi-fungsi pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam

masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## **2. Konsep Pemerintahan Daerah**

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: *Pertama*, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; *Kedua*, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan *ketiga*, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia menurut Siswanto (2005:5) meliputi :

- 1) Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
- 2) Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- 3) Pemerintahan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyebutan “prinsip otonomi seluas-luasnya” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diuraikan dengan beberapa asas menjadi :

- 1) Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

### 3) Tugas pembantuan

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

### **3. Konsep Otonomi Daerah**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008;992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2007;30).

Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Nurcholis, 2007;29). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan

sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

#### **a. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah**

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Widjaja, 2007;133).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007;7-8).

Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

##### **a. Prinsip Otonomi Luas**

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah

diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

b. Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Abdullah, 2007:5).

**b. Tujuan Otonomi Daerah**

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Deddy (2004;32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

#### **4. Konsep Pembinaan**

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan sering kali diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dengan demikian, pembinaan merupakan suatu aktivitas untuk mengarah perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Thoah (2011:207) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya

kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan selain menekankan aspek rasionalitas dan teknikal, juga sangat memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosialnya.

Menurut Widjaja (2001:139) mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Sedangkan Salam (2004:45) menyatakan bahwa pembinaan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang mempunyai sifat taat setia, patuh dan bermental baik, berwibawa dan berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi serta sadar akan tanggung jawab sebagai abdi negara abdi masyarakat dan juga aparatur negara.

Nawawi (2005:60) mengatakan pembinaan dilakukan dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepada bawahannya tentang bagaimana berbuat dan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan pekerjaan sehingga tugas tersebut dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan

organisasi. Oleh karena itu proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Mangunhardjana (2004:17) mengatakan bahwa unsur-unsur dalam pembinaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Isi sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan para peserta pembinaan maupun berhubungan dengan pengalaman mereka.
2. Isi tidak selalu teoritis, tetapi praktis dalam arti dapat dibahas dan dikembangkan dari berbagai pandangan dan pengalaman para peserta, dapat di praktekkan dalam kehidupan nyata.
3. Isi tidak terlalu banyak, tetapi disesuaikan dengan daya tangkap peserta dengan waktu yang tersedia.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli sebelumnya, maka indikator penelitian yang ditetapkan mengacu kepada teori Thoha (2004 : 77) sebagai berikut :

- 1) Tindakan
- 2) Proses
- 3) Perbaikan/Evaluasi

## **5. Konsep Usaha Kecil dan Menengah**

Usaha Kecil Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Kriteria usaha kecil dan mikro menurut World Bank dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu :

1. Small Enterprise, dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta, jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta.
2. Micro Enterprise, dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan setahun tidak melebihi \$ 100 ribu, jumlah aset tidak melebihi \$ 100 ribu.

### B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan atau panduan pada penelitian sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

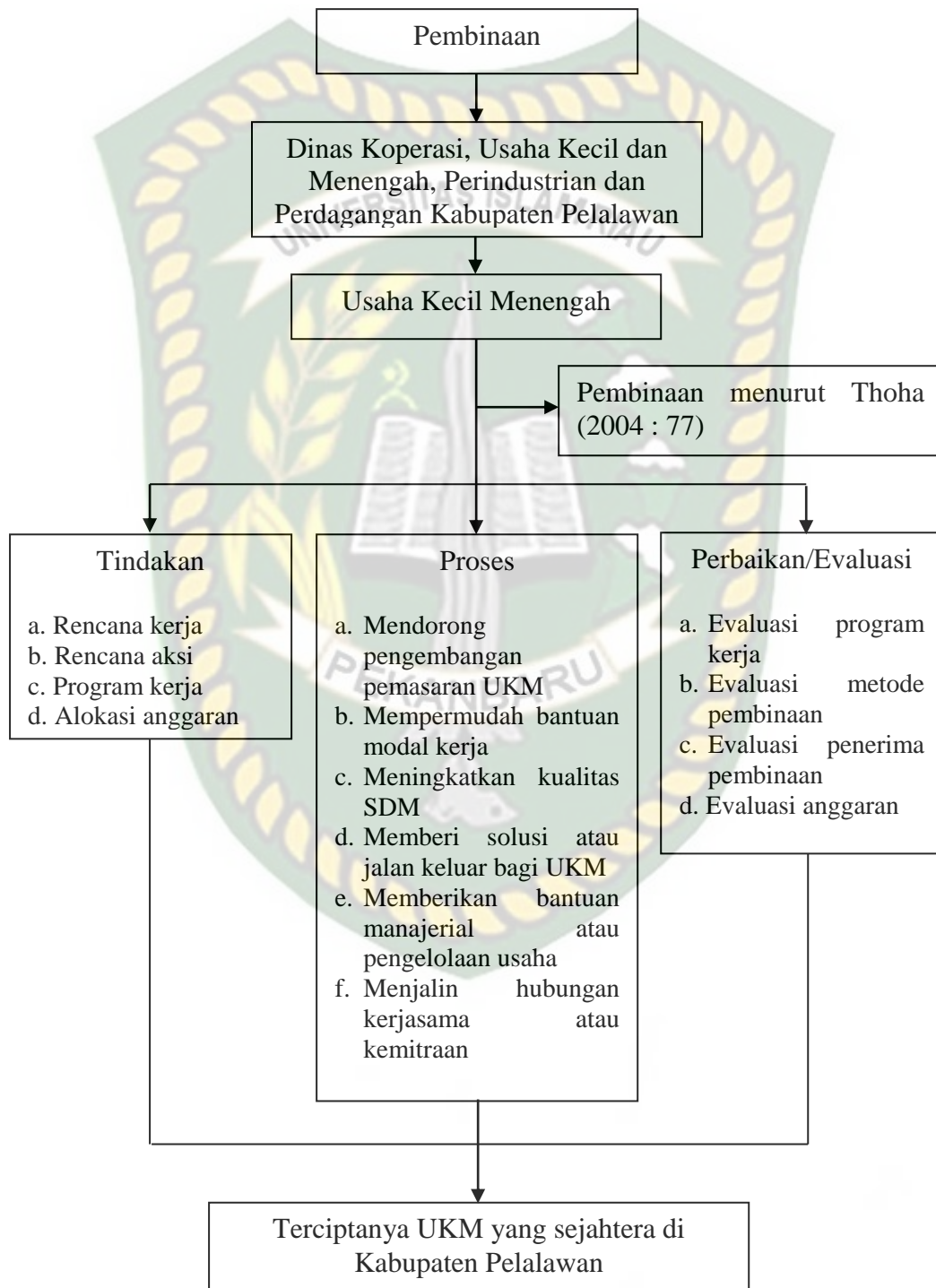
No	Nama/Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	2	3	4	5
1	Nanang Suparman, Dina Fitra Sulistia, Syamsir, Engkus.. JAP Vol. 7 No. 2 Tahun 2019.	Peranan Pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat Dalam Memajukan Perkoperasian di Daerah	Permasalahan yang berbeda, Lokasi penelitian, dan indikator yang digunakan	Metode penelitian
2	Muh. Ridwan, Hartutiningsih, Mass'ad Hatuwe. Jurnal Adminstrative Reform, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014.	Pembinaan Industri kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang.	Permasalahan utama, lokasi penelitian, dan indikator	Metode penelitian

1	2	3	4	5
3	Maulana Ibrahim. eJournal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No. 1 Tahun 2016.	Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)	Permasalahan utama, lokasi penelitian, dan indikator	Metode penelitian

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari permasalahan penelitian, kemudian acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Di Kecamatan Ukui)



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

#### D. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional variabel pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Permusyawaratan Daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan adalah salah satu instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan yang diberikan kewenangan dalam pengembangan dan pembinaan UKM dan berada di bawah Bupati Pelalawan.
- c. Pelaksanaan adalah menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan dinas.
- d. Pembinaan adalah upaya dalam mengubah UKM yang belum sejahtera menjadi lebih sejahtera secara ekonomi. Pembinaan pada penelitian ini adalah pembinaan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan kepada masyarakat pemilik UKM dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan, kemitraan, dan informasi. Di mana pada penelitian ini ditetapkan 3 indikator untuk mengukur pelaksanaan pembinaan yang dijalani dinas yakni tindakan, proses, dan evaluasi.
- e. Tindakan adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan dinas dan mengalokasikan anggaran kegiatan untuk direalisasikan pada tahun berjalan.

- f. Proses dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilaksanakan dinas dalam upaya melakukan pembinaan kepada usaha kecil dan menengah dengan mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- g. Evaluasi dalam penelitian ini adalah serangkaian evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk perbaikan pembinaan pada masa akan datang.

#### D. Operasionalisasi Variabel

Adapun operasional variabel dari penelitian sebagai berikut :

Tabel II.2. Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Di Kecamatan Ukui)

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. (Thoha, 2011:207)	Pelaksanaan Pembinaan	Tindakan	a. Rencana kerja b. Rencana aksi c. Program kerja d. Alokasi anggaran
		Proses	a. Mendorong pengembangan pemasaran UKM b. Mempermudah bantuan modal kerja c. Meningkatkan kualitas SDM d. Memberi solusi atau jalan keluar bagi UKM e. Memberikan bantuan manajerial atau pengelolaan usaha g. Menjalin hubungan kerjasama atau kemitraan
		Evaluasi	a. Evaluasi program kerja b. Evaluasi metode pembinaan c. Evaluasi penerima pembinaan d. Evaluasi anggaran

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan menggunakan metode kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada penelitian ini.

Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan, informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Sebagaimana dinyatakan Garna (1999:32) pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak selalu memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala yang didapatkan.

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena:

- a. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana penyelenggaraan program membina tenaga kerja lokal dan hambatananya. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses tersebut.

- b. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan pada Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, dengan alasan pemilihan lokasi belum seluruh UKM di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah terutama industri rumah tangga. Di Kecamatan Ukui banyak pelaku UKM dalam bidang pengolahan pangan dan salah satunya pernah mendapat penghargaan tingkat Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau atas inovasi pengolahan pangan yang berasal dari buah karet.

### **C. Informan Penelitian**

Sehubung dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah informan utama dan informan tambahan.

- a. Informan penelitian ini terdiri
  - 1) Kepala Bidang UMKM
  - 2) Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan UKM.
  - 3) Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Ukui yang mendapatkan pembinaan sebanyak 3 orang.
  - 4) Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Ukui yang belum mendapatkan pembinaan sebanyak 2 orang.

b. Key Informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.

#### **D. Teknik Penetapan Informan**

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2012: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yakni informan utama dan informan tambahan ya dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, sehingga dengan menetapkan informan di atas mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan UKM.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dan melalui riset kepustakaan meliputi :
  1. Gambaran umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan
  2. Rencana Strategis Dinas
  3. Program Pengembangan dan Pembinaan
  4. Jumlah UKM
  5. Jenis UKM

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan. Pengamatan dilakukan berupa aktivitas UKM dan aktivitas pelaksanaan pembinaan pada UKM.

### **2. Wawancara**

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden/partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki. Adapun wawancara yang dilakukan dengan seluruh informan yang sudah ditetapkan.

### 3. Dokumentasi

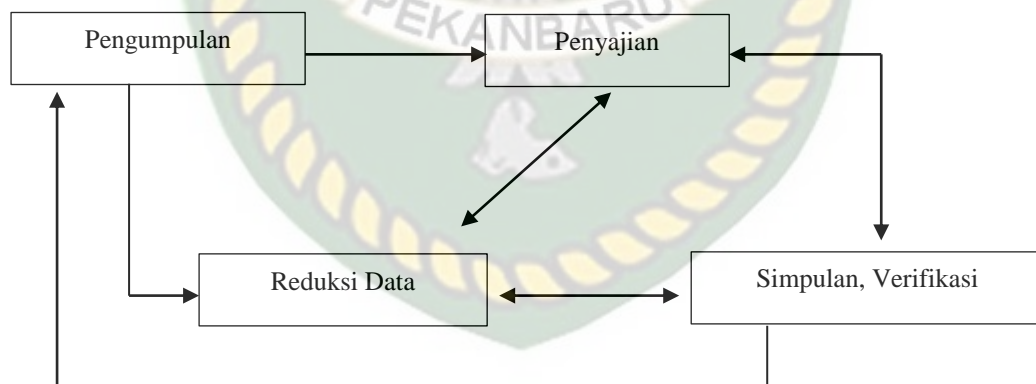
Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.

#### G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif.

Proses analisa data dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar III.1 : Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



(Miles dan Huberman, 2014:20)

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mensinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat

keterkaitan, kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adapun penjelasan mengenai komponen tersebut menurut Miles dan Huberman (2014:16-19), yaitu:

*Pertama*, Tahap pengumpulan data: peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.

*Kedua*, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal yang tersusah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

*Ketiga*, Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaannya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang

guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin

*Keempat*, Menarik kesimpulan/verifikasi adalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”, atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

## **H. Jadwal Penelitian**

Adapun jadwal dan waktu penelitian yang direncanakan untuk penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.1. Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Di Kecamatan Ukui)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020/2021																							
		Agustus				September				Oktober				November				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																		
2	Seminar UP										x														
3	Perbaikan UP											X	x												
4	Perbaikan daftar kuisioner														x										
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)															x	x								
6	Penelitian Lapangan																x								
7	Penelitian dan analisis data																	x	x						
8	Penyusunan laporan Penelitian (Skripsi)																			x					
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																			x	x				
10	Ujian Skripsi																				x				
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																					x	x		
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																								x

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

##### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km<sup>2</sup>.

##### 2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);

Sebelah Timur : Propinsi Kepulauan Riau.

Pelalawan kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

### **3. Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2019 adalah 386.428 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 203.683 jiwa dan perempuan 182.745 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 101.268 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.604 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan rata-rata penambahan penduduk pada satu wilayah dan periode tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2019 cukup tinggi 6,71 persen. Tingginya angka pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan tingkat kelahiran yang tinggi juga karena tingginya jumlah pendatang dari luar wilayah Pelalawan terkait dengan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan dan perkebunan.

Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 28 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi

adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 523 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km<sup>2</sup>.

Salah kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah Kecamatan Ukui, sehingga pada penelitian ini ditampilkan secara utuh jumlah penduduk Kecamatan Ukui berdasarkan jenis kelamin, dan kepala keluarga, serta sebarannya pada tahun 2020.

Tabel IV.1 Penduduk Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin			Kepala Keluarga
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Silikuan Hulu	1.231	1.231	2.462	669
2	Lubuk Kembang Sari	1.683	1.655	3.338	849
3	Lubuk Kembang Bunga	2.265	1.734	3.999	1.047
4	Air Hitam	2.247	1.978	4.225	1.068
5	Kampung Baru	1.592	1.505	3.097	835
6	Ukui Satu	3.204	3.051	6.255	1.522
7	Ukui Dua	3.826	3.354	7.180	1.841
8	Bukit Gajah	1.892	1.823	3.715	994
9	Bukit Jaya	1.057	1.007	2.064	605
10	Air Emas	1.285	1.212	2.497	438
11	Tri Mulya Jaya	893	763	1.656	429
12	Bagan Limau	879	743	1.622	312
	Jumlah	22.054	20.056	42.110	10.937

Sumber: BPS Kecamatan Ukui, 2020

## B. Gambaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

### 1. Kedudukan dan Fungsi Dinas

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mempunyai fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi, Bidang UMKM, Bidang Perindustrian, dan Bidang Perdagangan;
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi, Bidang UMKM, Bidang Perindustrian, dan Bidang Perdagangan;
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- (4) Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- (5) Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- (6) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

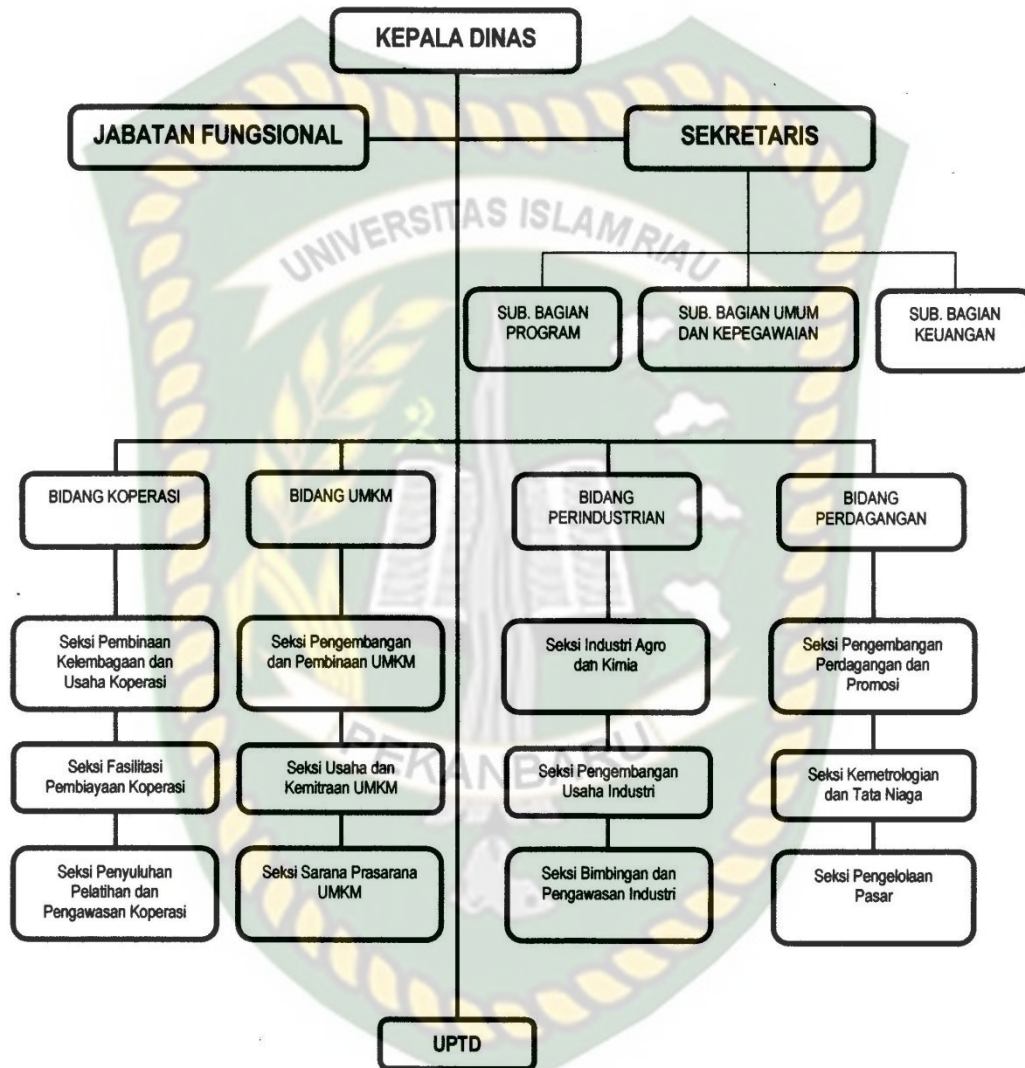
- (7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- (8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Susunan Organisasi Dinas**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Koperasi;
  - d. Bidang UMKM;
  - e. Bidang Perindustrian;
  - f. Bidang Perdagangan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
  - h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN PELALAWAN**



Sumber : Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 70 Tahun 2016

### 3. Tugas dan Fungsi

#### Bidang UMKM

- (1) Bidang UMKM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang UMKM. Penyelenggaraan urusan pada seksi pengembangan dan pembinaan umkm, seksi usaha dan kemitraan umkm dan seksi sarana prasarana umkm.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kepala Bidang UMKM mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang UMKM;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang UMKM;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang UMKM;
- d. Perumusan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada seksi pengembangan dan pembinaan umkm, seksi usaha dan kemitraan umkm dan seksi sarana prasarana umkm;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada seksi pengembangan dan pembinaan umkm, seksi usaha dan kemitraan umkm dan seksi sarana prasarana umkm;
- f. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada seksi pengembangan dan pembinaan umkm, seksi usaha dan kemitraan umkm dan seksi sarana prasarana umkm.
- g. Pelaksanaan administrasi Bidang UMKM; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

**Bidang UMKM terdiri dari:**

**Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menghimpun dan menginventerisasi serta mengumpulkan dan mengelola data usaha mikro kecil menengah pemasaran produk usaha mikro, menjabarkan dan menyusun pedoman teknis pemberdayaan usaha mikro menengah akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan usaha mikro fasilitasi informasi usaha kesempatan berusaha dan dukungan bagi usaha mikro kecil menengah;
- c. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi pengembangan dan pembinaan usaha mikro kecil menengah secara rutin maupun berkala;
- d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM;
- g. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang UMKM sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menghimpun dan menginventerisasi serta pengumpulan dan pengelolaan data usaha dan kemitraan umkm, penjabaran dan kerja sama usaha kemitraan umkm.
- c. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi usaha dan kemitraan usaha mikro kecil menengah secara rutin maupun berkala;
- d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM;
- g. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang UMKM sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Sarana Prasarana UMKM mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Sarana Prasarana UMKM berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menghimpun dan menginventerisasi. serta pengumpulan dan pengelolaan data kebutuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses produksi,

distribusi dan promosi serta pemasaran produk umkm serta kelengkapan sarana dan prasarana umkm;

- c. Mengkonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi sarana dan prasarana umkm secara rutin maupun berkala;
- d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Sarana Prasarana UMKM;
- g. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang UMKM sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB V**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Identitas Informan**

Sebelum dibahas mengenai pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (studi di Kecamatan Ukui), terlebih dahulu diuraikan identitas informan dalam penelitian.

Identitas informan ini perlu untuk disajikan dalam memberikan gambaran pribadi dari masing-masing individu sebagai sumber informasi dari penelitian ini. Di mana identitas informan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian**

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan
1	Jufri, S.Kom	46	Laki-laki	S-1	Kasi Sarana dan Prasarana UMKM
2	Lila Purnama Sari, SE	51	Perempuan	S-1	Kasi Pengembangan dan Pembinaan UMKM
3	Saliyem	49	Perempuan	SD	UMKM Browjika dan Kerupuk Ikan Biji Karet
4	Misni	43	Perempuan	SD	UMKM Aneka Keripik Singkong dan Aneka Krupuk
5	Siti Masriah Zunairi	43	Perempuan	SMA	UMKM Aneka Roti
6	Ahmad Sofari	35	Laki-laki	SMP	UMKM Tahu
7	Marwati	48	Perempuan	SD	UMKM Aneka Keripik Singkong

Sumber: Olahan Penelitian, 2021.

Data yang terdapat pada tabel di atas memberikan penjelasan mengenai identitas informasi. Di mana dari segi usia informan berada pada rentang usia 35

– 51 tahun dan dapat dikatakan dari segi usia informan berada tingkatan usia yang masih sangat produktif, sehingga berada pada tahapan yang memiliki aktivitas cukup tinggi dalam bekerja dan beraktivitas. Dari faktor jenis kelamin informan penelitian ini telah terwakili dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian dari tingkat pendidikan diketahui bahwa tingkat pendidikan terendah pernah mengecapi pendidikan SD dan paling tinggi berlatar belakang mengecapi pendidikan S-1.

Dari 7 orang informan yang ditetapkan dan ditemui pada penelitian ini terdapat 2 orang ASN atau pegawai di Dinas Koperasi, UMKM, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, 3 orang pemilik usaha atau pengusaha UMKM yang pernah mendapatkan bantuan pembinaan dari pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan. Kemudian terdapat 2 orang informan yang juga pemilik UMKM di Kecamatan Ukui, tetapi belum pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan.

Informan yang berasal dari pengusaha atau pemilik usaha UMKM di Kecamatan Ukui dipilih dengan latar belakang jenis usaha yang berbeda dan sudah mulai berkembang serta usaha yang dijalani di atas 2 tahun. Di mana dari kriteria ini, maka peneliti mendapatkan informan penelitian yang berjumlah 3 UMKM pernah mendapatkan pembinaan dan 2 UMKM yang belum pernah mendapatkan pembinaan.

Wawancara dengan Saliyem salah seorang pemilik UMKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah memberikan informasi bahwa;

*Saya membuat aneka makanan dengan tambahan bahan biji karet seperti brownies kering dan kerupuk ikan dengan tambahan biji karet dan tortila*

*biji karet. Usaha ini telah dijalani lebih dari 3 tahun. (Wawancara pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020).*

Informasi yang disampaikan ini sangat jelas memberikan keterangan bahwa pengusaha UMKM telah memiliki jenis usaha yang kreatif dengan memanfaatkan bahan baku yang mudah diperoleh yakni biji buah karet. Dengan tingkat kreativitas ini dibutuhkan pembinaan dari pemerintah daerah, sehingga usaha ini bisa berkembang dan maju pada masa mendatang. Melalui pembinaan yang diberikan tentunya akan memberikan dan membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, sehingga keberadaan UMKM bisa berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Wawancara dengan Misni pemilik UMKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah diperoleh informasi berikut ini:

*Pembuatan aneka keripik singkong, jajanan dari singkong, dan aneka kerupuk. Usaha ini digeluti sudah lebih dari 10 tahun terakhir. (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Tanggapan yang disampaikan informan di atas menjelaskan bahwa usaha yang dijalani merupakan usaha yang banyak digeluti berbagai pengusaha sejenis lainnya. Namun begitu dari pengamatan peneliti usaha olahan ubi atau singkong yang digeluti ini sangat komplit dan menghasilkan beragam produk, sehingga dengan adanya pembinaan yang terus menerus mampu mengembangkan usaha ini dengan maksimal dan bisa membuka sumber-sumber perekonomian lainnya seperti tenaga kerja, pedagang, dan lain sebagainya.

Wawancara dengan Siti Masriah Zunairi pemilik UMKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah diperoleh informasi berikut:

*Usaha pembuatan berbagai aneka roti yang sudah dijalani lebih dari 5 tahun (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Tanggapan yang diberikan pengusaha UMKM di atas menjelaskan bahwa usaha yang dijalannya lebih dari 5 tahun dengan memproduksi beraneka ragam roti. Di mana usaha ini telah mendapatkan 2 kali pembinaan dari pemerintah daerah yakni pembinaan manajemen usaha dan bantuan pengurusan P.IRT atau izin usaha rumah tangga dari pemerintah daerah.

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan penjelasan bahwa jenis usaha yang dijalani beragam, sehingga menjadi landasan yang bisa digunakan sebagai gambaran mengenai pembinaan yang telah diberikan dinas pada pengusaha UMKM. UMKM yang telah mendapatkan pembinaan saat ini sudah mulai berkembang seperti memiliki merek dagang dan mendapatkan sertifikat P.IRT yang tentunya menjadi modal untuk pengembangan usaha pada masa mendatang.

Ahmad Sofari pemilik UMKM yang belum pernah mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pelalawan memberikan informasi bahwa:

*Produksi pembuatan tahu yang baru berjalan lebih kurang 3 tahun (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Tanggapan di atas memberikan gambaran bahwa salah satu jenis usaha yang bisa mendapatkan pembinaan adalah pengolahan kedelai menjadi tahu. Di mana usaha ini sebenarnya sangat menjanjikan untuk berkembang, karena dari pengolahan kacang kedelai bisa mendapatkan beberapa turunan hasil produksi seperti air soya atau air tahu, kembang tahu, dan tahu itu sendiri. Kemudian ada

juga yang mengolah kembang tahu menjadi kerupuk tahu, sehingga potensi UMKM tahu ini pun cukup menjadi bila mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.

Marwati pemilik UMKM Aneka Keripik Singkong di Kecamatan Ukui menyampaikan tanggapannya berikut:

*Aneka keripik dan olahan singkong sudah berjalan sekitar 5 tahunan (Wawancara pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020)*

Usaha keripik yang berasal dari umbi-umbian seperti singkong, umbi lainnya sangat bisa dikembangkan untuk masa mendatang. Di mana usaha ini menghasilkan produk yang memiliki daya tahan cukup lama dan bisa terus dikreasikan, sehingga usaha ini pantas untuk mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah pada masa mendatang agar tetap bertahan dan berkembang.

Kemudian dari 2 informan berasal dari UMKM di Kecamatan Ukui yang belum pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas yang berwenang. Namun usaha yang dijalani para pengusaha UMKM tersebut semakin berkembang dan telah memiliki merek dagang sebagai trademark atas usahanya, sehingga bila mendapatkan pembinaan dengan baik dari pemerintah bukan tidak mungkin mampu meningkatkan dan menumbuhkan perkembangan usaha UMKM tersebut.

Dengan demikian dari identitas informan penelitian yang telah dipaparkan ini, maka jelaslah bahwa para informan merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan kompetibel dalam bidangnya serta mengetahui dengan jelas permasalahan yang diterima dan dihadapinya. Dengan demikian dari informan penelitian ini bisa memberikan gambaran bahwa data yang diperoleh

pada penelitian merupakan gambaran atau fakta yang ada mengenai pembinaan UMKM di Kabupaten Pelalawan terkhususnya di Kecamatan Ukui oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki potensi besar untuk ketahanan ekonomi Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuannya bertahan dalam menghadapi badai krisis keuangan dan ekonomi yang menimpa Indonesia sejak medio tahun 1997. Hal ini juga membuktikan bahwa UKM merupakan salah satu pelaku ekonomi yang kuat dan ulet. Diperkirakan di masa depan UKM akan cukup berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan ekonomi yang cepat berubah dan dapat meningkatkan posisi daya saing bukan hanya dalam pasar lokal tetapi juga dalam mendorong aktivitas ekspor yang pada akhirnya akan lebih mendorong pengembangan perekonomian daerah.

Kabupaten Pelalawan memiliki potensi industri yang besar, terutama untuk skala industri kecil dan menengah. Banyak usaha berbasis tekstil, agro, perikanan dan hasil hutan dikembangkan secara tradisional maupun modern oleh masyarakat luas di Kabupaten Pelalawan. Industri UMKM berkembang cukup signifikan dari tahun ke tahun melalui pembinaan oleh dinas teknis yang terkait. Namun terdapat juga UMKM yang belum pernah mendapat pembinaan tetapi masih tetap eksis dan tumbuh berkembang dalam menjalankan usahanya.

Untuk itu, pada penelitian ini penelitian menetapkan beberapa indikator sebagai garis pedoman melakukan analisis atas pembinaan yang dilakukan dan

diberikan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) khususnya yang berada di Kecamatan Ukui. Di mana indikator yang ditetapkan yakni: tindakan, proses, dan evaluasi.

### **1. Tindakan**

Tindakan menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan. Tindakan adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan dinas dan mengalokasikan anggaran kegiatan untuk direalisasikan pada tahun berjalan. Pada penelitian ini peneliti menetapkan salah satu indikator yang menjadi pokok pembahasan utama yakni tindakan. Di mana tindakan merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan dinas dan mengalokasikan anggaran kegiatan untuk direalisasikan pada tahun berjalan.

Pada penelitian tindakan yang dimaksud merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam usaha meningkatkan perkembangan UMKM di Kecamatan Ukui.

#### **a. Rencana Kerja**

Nafarin (2009:4) mengatakan rencana kerja adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana kerja adalah serangkaian perencanaan yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada periode berjalan atau tahun berjalan. Di mana rencana kerja di sini merupakan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas

Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan untuk dilaksanakan terutama pada bidang UMKM mengenai pembinaan.

Rencana kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rencana kerja yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam membina UMKM yang ada dalam berbagai aspek pengembangannya dan peningkatan mutu/kualitasnya.

Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Terwujudnya sarana dan prasarana UMKM (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Salah satu rencana aksi yang hendak dicapai pada bidang UKM adalah untuk mewujudkan sarana dan prasarana UKM. Di mana sarana dan prasarana yang dimaksud adalah terpenuhinya gedung pelatihan dan tersedianya berbagai peralatan pendukung untuk membantu pembinaan UKM. Adanya sarana dan prasarana pendukung tersebut akan mempermudah Dinas untuk memberikan beragam pembinaan dan bisa lebih terfokus, dikarenakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah dipetakan kebutuhan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Lila Purnama Sari, SE selaku Kasi Pengembangan dan Pembinaan UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Melakukan penyuluhan UKM kepada ibu-ibu PKK (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020).*

Rencana kerja yang dilakukan untuk aktivitas di lapangan dalam upaya mendekatkan diri ke masyarakat dan menjaring kelompok usaha UKM adalah dengan mengadakan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK tentang arti pentingnya

UKM dan menyampaikan program kerja pemerintah daerah. Melalui penyuluhan yang dilakukan dengan ibu-ibu bisa menebarkan informasi kepada masyarakat lainnya tentang pembinaan UKM

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam melakukan pembinaan setidaknya di Bagian UMKM Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dilaksanakan oleh Seksi Sarana dan Prasarana untuk mempersiapkan dan mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana UMKM seperti mempersiapkan peralatan pelatihan dan peralatan bantuan yang akan diserahkan kepada UMKM yang menjadi sasaran program kerja. Kemudian dari Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM memberikan beragam kegiatan kepada masyarakat seperti melakukan penyuluhan kepada kelompok PKK, dan Forum UMKM yang ada.

Pengamatan lapangan yang peneliti perhatikan bahwa dalam memenuhi kebutuhan pembinaan salah satu aksi yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah mengadakan pembelian berbagai peralatan pendukung untuk membina UKM seperti mesin pengolahan (penggiling dan peniris), mesin pengeleman plastik, dan berbagai peralatan lainnya yang disediakan untuk keperluan pembinaan pada saat pelatihan. Kemudian untuk lebih lanjutnya adanya perbaikan gedung di dinas untuk digunakan sebagai tempat pelayanan UKM.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dari segi rencana program kerja yang telah ditetapkan dalam memberikan pembinaan kepada UMKM

minimal ada dua yang dilakukan yakni mempersiapkan sarana pelatihan dan sarana bantuan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan demikian jelaslah bahwa Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan telah memiliki program kerja yang ditujukan untuk pembinaan UMKM.

#### **b. Rencana Aksi**

Rencana Aksi Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Dalam rencana aksi kinerja ini menyajikan program, kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, serta memuat pembagian target per triwulan yang akan dicapai dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja (<https://sukabumikab.go.id/portal>, diakses tanggal 22 Maret 2021).

Rencana aksi adalah rencana kerja yang akan dilaksanakan berpedoman dari rencana kerja yang telah ditetapkan. Di mana pada penelitian ini rencana aksi merupakan turunan dan program kerja yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan. Di mana rencana aksi ini kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan untuk melakukan pembinaan kepada UMKM yang ada.

Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Pelaksanaan pelatihan, pembinaan kemitraan, bantuan permodalan dan keterampilan lainnya (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Rencana aksi yang akan dilaksanakan bidang UMKM dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat pengusaha UKM adalah dengan melaksanakan pelatihan, pembinaan kemitraan, bantuan modal, dan bantuan keterampilan lainnya. Dengan adanya rencana aksi ini, langkah-langkah pembinaan terhadap UKM bisa dijalankan sesuai harapan.

Hasil wawancara dengan Lila Purnama Sari, SE selaku Kasi Pengembangan dan Pembinaan UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Pelaksanaan pelatihan, pembinaan kemitraan, bantuan permodalan dan keterampilan lainnya (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Tanggapan yang diberikan informan di atas menjelaskan bahwa rencana aksi yang telah ditetapkan merupakan implementasi dari rencana kerja dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembinaan kemitraan, bantuan permodalan, dan peningkatan keterampilan. Di mana dari rencana aksi yang ada dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan dilakukan kepada para UMKM untuk meningkatkan mutu/kualitas dari produk yang dihasilkan maupun dalam penataan usahanya seperti manajemen usaha dan sebagainya. Sementara dari segi pembinaan kemitraan dilakukan dalam bentuk kerja sama yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan yang ada untuk mengeluarkan CSR nya dalam membantu UMKM-UMKM seperti permodalan, pembinaan, dan penyediaan tempat untuk menjual produknya maupun tempat untuk berjualan.

Temuan hasil penelitian ini yakni telah ada rencana aksi yang ditetapkan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat UMKM dalam usaha meningkatkan mutu/kualitas UMKM yang telah ada.

### c. Program Kerja

Menurut Arikunto (2004:3) program adalah suatu unit atau suatu kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Program kerja adalah sekumpulan rencana yang ditetapkan untuk dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Di mana pada penelitian ini program kerja merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sebagai turun dari rencana yang ditetapkan dan aksi yang akan dijalani. Dengan demikian program merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas UMKM.

Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, koordinasi dengan pelaku usaha UMKM (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Tanggapan yang diberikan informan di atas menjelaskan bahwa Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, koordinasi dengan pelaku usaha UMKM. Dengan demikian jelaslah bahwa beragam program yang

ditetapkan dan dilaksanakan pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan mutu UMKM melalui pembinaan yang berkelanjutan.

Wawancara dengan Saliyem salah seorang pemilik UMKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah memberikan informasi bahwa;

*Bentuk pembinaan dari pemerintah misalnya seperti memberikan pelatihan, kegiatan PKK, dan mendorong untuk mengikut sertakan usaha saya jika ada pelombaan. (Wawancara pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020)*

Beragama bentuk pembinaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terutama pengusaha UKM seperti memberikan pelatihan, kegiatan PKK, dan mendorong untuk mengikut sertakan usaha saya jika ada pelombaan. Di mana pembinaan ini disesuaikan dengan program kerja yang ditetapkan pemerintah, sehingga pada setiap pembinaan telah ditetapkan kriteria UKM yang diikutsertakan pada pembinaan.

Wawancara dengan Misni pemilik UMKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah diperoleh informasi berikut:

*Pembinaan yang didapat berupa pelatihan, PKK, pemberian pinjaman modal usaha, pemberian alat mengolah singkong, pemberian pinjaman modal sendiri bukan dari pemerintah tetapi dari KUBE (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan penjelasan bahwa pembinaan berupa pelatihan, PKK, pemberian pinjaman modal usaha, pemberian alat mengolah singkong, pemberian pinjaman modal sendiri bukan dari pemerintah tetapi dari KUBE. Dengan demikian jelaslah bahwa beragam jenis program kerja yang ditetapkan dan dilaksanakan pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada UKM.

Wawancara dengan Siti Masriah Zunairi pemilik UMKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah diperoleh informasi berikut:

*Pembinaan berupa pelatihan, PKK dan kadang orang dinas mengecek dan memberikan saran-saran. Kalau bantuan berupa modal (pinjaman) dan barang. Telah memperoleh izin usaha dengan Kode P.IRT dan label halal. (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Pembinaan yang diberikan Dinas kepada pengusaha UMKM berupa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha seperti manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan manajemen pembukuan. Kemudian peningkatan mutu usaha dari mikro menjadi kecil dengan memberikan beragam pembinaan.

Ahmad Sofari pemilik UMKM yang belum pernah mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pelalawan memberikan informasi bahwa:

*Belum pernah mendapat pembinaan dari dinas atau bantuan apapun dari pemerintah (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Informasi dari informan di atas menunjukkan bahwa selama menjalankan usahanya belum pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah dalam berbagai bentuk baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak seluruh jenis usaha mendapatkan pembinaan, kalau ada yang mendapatkan pembinaan tentunya yang sudah melalui seleksi ataupun adanya rekomendasi dari pemerintah setempat seperti pemerintah desa/kelurahan.

Marwati pemilik UMKM Aneka Keripik Singkong di Kecamatan Uku menyampaikan tanggapannya berikut:

*Pembinaan berupa pelatihan dan PKK (Wawancara pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020)*

Tanggapan yang disampaikan ini memberikan gambaran bahwa walaupun UMKM tidak mendapatkan pembinaan secara langsung dari pemerintah daerah. Namun secara khusus telah ada pembinaan yang diterima pengusaha melalui beragam pelatihan yang ada di tingkat desa/kelurahan seperti melalui PKK.

Temuan hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa telah ada program kerja atas pembinaan UMKM yang dilakukan Dinas kepada pengusaha UMKM, sehingga dengan adanya program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas/mutu, kuantitas, dan juga tumbuh berkembangnya UMKM terutama di Kecamatan Ukui.

#### **d. Alokasi Anggaran**

Menurut Nafarin (2009:19) anggaran adalah suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang atau dalam jangka waktu. Alokasi anggaran adalah alokasi dana yang diperuntukkan pemerintah bagi instansi tertentu untuk menyelenggarakan roda pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Di mana pada penelitian ini alokasi anggaran merupakan alokasi dana yang dipersiapkan untuk pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam usaha menumbuh kembangkan UMKM yang ada di masyarakat.

Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Pada tahun 2020 dialokasi dana pembinaan UMKM sebesar Rp. 957.096.264 (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Tanggapan ini menjelaskan bahwa dalam melakukan pembinaan kepada UMKM di Kabupaten Pelalawan, pemerintah daerah melalui dinas terkait telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 957.096.264,-. Anggaran yang telah disediakan digunakan untuk pembinaan UMKM bagi pembinaan langsung berupa pemberian peningkatan keterampilan dan kemampuan, serta adanya bantuan dalam memberikan bantuan perizinan seperti P.IRT, sertifikat Halal dan lain sebagainya.

Hasil wawancara dengan Lila Purnama Sari, SE selaku Kasi Pengembangan dan Pembinaan UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Alokasi anggaran sudah dilakukan sesuai kebutuhan (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dari alokasi anggaran yang dimiliki Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020 lalu telah dipersiapkan dana lebih kurang 1 Milyar untuk kegiatan pembinaan UMKM. Temuan hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa telah ada alokasi dana yang dipersiapkan dan dianggarkan untuk pembinaan UMKM di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang peneliti lakukan terlihat bahwa dari rencana kerja, rencana aksi, dan program kerja, serta alokasi anggaran yang dimiliki. Di mana Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan telah menuangkan rencana kerja, rencana aksi, program, dan anggaran pada buku pedoman yang dinamakan Rencana Strategis atau Renstra dari tahun 2016-2021. Kemudian setiap tahunnya berpedomankan Renstra tersebut disusun juga rencana kerja dan rencana aksi

atau disingkat dengan RKA. Di mana dalam Renstra dan RKA tersebut terdapat beragam program kerja yang ditetapkan dan dilaksanakan serta besaran anggaran yang diperkirakan. Hal ini tentunya telah memperlihatkan telah adanya tindakan yang dilakukan dinas dalam upaya melakukan pembinaan terhadap UKM setiap tahunnya.

Temuan hasil penelitian dari indikator tindakan telah adanya rencana kerja yang ditetapkan, rencana aksi yang dirumuskan, program kerja yang akan dilaksanakan, dan adanya alokasi anggaran yang disediakan dalam melakukan pembinaan pada UKM di Kabupaten Pelalawan khususnya pada Kecamatan Ukui.

Hasil penelitian pada indikator tindakan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan telah memiliki rencana kerja, rencana aksi yang di, program kerja, dan menetapkan anggaran dari pembinaan UKM. Melalui tindakan yang telah dilaksanakan ini, memperlihatkan keseriusan dari pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat pelaku UMKM untuk dapat tumbuh dan berkembang, walaupun dengan jumlah pelaku UMKM yang terbatas dari segi jumlah yang dibina setiap tahunnya. Dengan demikian indikator tindakan yang ditetapkan pada penelitian dapat dikatakan sudah dilaksanakan.

## **2. Proses**

Menurut Handayani (2006:20) proses adalah rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran sampai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan. Proses dalam penelitian ini adalah kegiatan yang

dilaksanakan dinas dalam upaya melakukan pembinaan kepada usaha kecil dan menengah dengan mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Proses merupakan rangkaian pelaksanaan atas kegiatan pembinaan yang dijalani untuk menumbuh kembangkan UMKM di Kabupaten Pelalawan. Di mana proses pembinaan kepada UKM ini menjadi kewenangan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.

#### **a. Mendorong pengembangan pemasaran UKM**

Mendorong pengembangan pemasaran UKM merupakan dorongan yang diberikan pihak luar kepada pengusaha dalam upaya memperluas jaringan pemasaran, sehingga mampu meningkatkan kuantitas produk dan mencapai profit usaha. Di mana pada penelitian ini mendorong pengembangan pemasaran UKM adalah langkah yang dilakukan Dinas baik secara langsung maupun melalui kemitraan dengan berbagai lembaga dalam mendorong UKM di Kecamatan Ukui.

Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Meningkatkan kemitraan dan kualitas produksi serta desing kemasan produk (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam upaya mendorong pengembangan pemasaran UKM telah dilakukan peningkatan kemitraan dengan lembaga-lembaga yang dianggap memiliki kemampuan dalam membuka peluang pengembangan UKM dan juga peningkatan kualitas dari mutu produk UKM dari mulai mutu produk, desig kemasan dan pemberian izin seperti P.IRT dan Halal.

Wawancara dengan Saliyem salah seorang pemilik UKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah memberikan informasi bahwa;

*Pemerintah hingga saat ini dalam pengembangan pemasaran masih berupa ajakan mengikuti perlombaan PKK (Wawancara pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020)*

Tanggapan di atas memperjelaskan bahwa pemerintah melalui Bidang UMKM telah melakukan langkah dengan mengajak pengusaha UKM untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan sebagai bentuk pemasaran atas produk yang dihasilkan. Salah satu ajakan tersebut adalah dengan mengajak pelaku usaha UKM untuk ikut serta mengikuti perlombaan yang diadakan mulai dari tingkat paling rendah yakni kecamatan sampai ke tingkat kabupaten.

Wawancara dengan Misni pemilik UKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah diperoleh informasi berikut:

*Dari dinas sendiri dorongannya berupa pemberian pelatihan, PKK, dan informasi-informasi terkait bantuan untuk UKM (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Dorongan yang diberikan pemerintah melalui Bidang UMKM adalah dengan cara memberikan pelatihan, penyuluhan kepada PKK, dan menyampaikan beragam informasi terkait UKM. Dengan demikian jelas bahwa telah ada dorongan yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha UKM yang ada di Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Ukui.

Wawancara dengan Siti Masriah Zunairi pemilik UKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah diperoleh informasi berikut:

*Pemerintah memberikan dorongan agar tetap mengikuti pelatihan dan PKK, serta memberi beberapa saran agar produk dapat lebih menarik (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Tanggapan dari informan yang pernah mendapatkan pembinaan adanya dorongan yang diberikan pemerintah seperti mengikuti pelatihan dan meningkatkan kualitas hasil produksi seperti menjaga kualitas/mutu dan kemasan yang menarik serta dalam berbagai ukuran untuk di pasarkan di Market yang lebih luas lagi.

Ahmad Sofari pemilik UKM yang belum pernah mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pelalawan memberikan informasi bahwa:

*Pemerintah daerah tidak pernah memberikan dorongan apa pun (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Pelaku UKM yang belum pernah mendapatkan bantuan pembinaan dari pemerintah daerah merasa belum ada upaya atau langkah yang dilakukan pemerintah untuk mendorong usaha terus maju dan berkembang. Di mana pelaku UKM yang ada berharap adanya dukungan dari pemerintah selain pembinaan langsung juga dari pembinaan dalam mempermudah memperoleh bantuan perizinan maupun bantuan modal.

Marwati pemilik UKM Aneka Keripik Singkong di Kecamatan Ukui menyampaikan tanggapannya berikut:

*Pemerintah memberikan arahan melalui ibu-ibu PKK dan membentuk forum para pemilik UKM (Wawancara pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020)*

Langkah dorongan yang diterima para UKM yang belum pernah mendapatkan pembinaan diberikan Dinas dalam bentuk pelatihan-pelatihan melalui PKK dan dorongan untuk membentuk forum UKM agar mudah dalam

pendataan dan juga mendapatkan informasi mengenai berbagai hal tentang UKM seperti program pembinaan dari pemerintah daerah.

#### **b. Mempermudah bantuan modal kerja**

Mempermudah bantuan modal kerja merupakan usaha yang dilakukan pemerintah dalam membuka peluang dan kesempatan kepada UKM untuk bertumbuh kembang dalam menjalankan usahanya. Di mana bantuan modal tidak serta merta dalam bentuk uang, tetapi juga berupa bantuan kerja sama dengan berbagai pihak yang disarankan pemerintah daerah.

Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Menjalin kemitraan dengan perusahaan untuk mendapatkan CSR dan mempermudah izin usaha untuk persyaratan pinjaman modal bank (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Informasi yang disampaikan di atas memberikan pernyataan bahwa pemerintah daerah melalui Bidang UMKM telah menjalin kemitraan dengan perusahaan untuk mendapatkan CSR dan mempermudah izin usaha untuk persyaratan pinjaman modal bank. Langkah ini dilakukan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UKM yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Hasil wawancara dengan Lila Purnama Sari, SE selaku Kasi Pengembangan dan Pembinaan UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Bantuan modal diberikan jika UKM sudah memenuhi kriteria (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa telah adanya jalinan kemitraan dengan perusahaan untuk mendapatkan CSR dan mempermudah izin usaha untuk persyaratan pinjaman modal bank dan Bantuan modal diberikan jika

UKM sudah memenuhi kriteria. Dengan demikian jelaslah bahwa telah ada upaya dari pemerintah untuk mempermudah pengusaha UKM untuk mendapatkan bantuan modal.

Wawancara dengan Saliyem salah seorang pemilik UKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah memberikan informasi bahwa;

*Untuk saat ini ini masih belum ada* (Wawancara pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020)

Tanggapan yang disampaikan di atas menggambarkan bahwa bantuan langsung dari pemerintah berupa modal belum ada. Tetapi bantuan dari bentuk mempermudah mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan lainnya telah diupayakan, melalui pemberian surat keterangan usaha atau izin usaha sehingga pengusaha UKM mendapatkan pinjaman modal dari bank seperti Kredit Mikro dan sebagainya.

Wawancara dengan Misni pemilik UKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah diperoleh informasi berikut:

*Pemerintah membantu mempermudah dalam pemberian pinjaman modal usaha dan memberi bantuan berupa alat* (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)

Wawancara dengan Siti Masriah Zunairi pemilik UKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah diperoleh informasi berikut:

*Pemerintah mempermudah urusan peminjaman modal usaha, memberi mixer, dan alat press kemasan. Modal sendiri berasal dari KUBE* (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)

Dengan demikian jelaslah bahwa telah ada bantuan dalam bentuk modal yang diberikan pemerintah daerah baik secara langsung dari pemerintah maupun

dari hasil kerja sama kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

### c. Meningkatkan kualitas SDM

Meningkatkan kualitas SDM merupakan upaya atau langkah yang dilakukan pemerintah daerah dengan cara memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai cara seperti memberikan pelatihan, meningkatkan keterampilan, dan lain sebagainya.

Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Mengutus pelaku UKM untuk mengikuti pelatihan, baik tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Informasi di atas menjelaskan bahwa pemerintah daerah melalui Bidang UMKM telah mengutus pelaku UKM untuk mengikuti pelatihan, baik tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Melalui upaya ini diharapkan pelaku UKM mampu meningkatkan kualitasnya, sehingga bisa bertahan dan berkembang pada masa mendatang.

Hasil wawancara dengan Lila Purnama Sari, SE selaku Kasi Pengembangan dan Pembinaan UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Dinas sudah berusaha melakukan sesuai yang diharapkan (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Dengan demikian dalam usaha meningkatkan kemampuan UKM pemerintah daerah telah melakukan upaya mengutus pelaku UKM untuk mengikuti pelatihan, baik tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten agar bisa

dijadikan pelajaran atau studi banding bagi pengusaha dalam mengembangkan usahanya, sehingga bisa tumbuh dan berkembang pada masa mendatang.

#### **d. Memberi solusi atau jalan keluar bagi UKM**

Memberi solusi atau jalan keluar bagi UKM adalah langkah yang selalu disampaikan pemerintah daerah kepada beberapa UKM yang telah mendapatkan pembinaan. Di mana kebanyakan dari UKM sering kali menyampaikan permasalahan dalam memasarkan produk, meningkatkan kualitas produk, dan bahkan bantuan modal, serta sulitnya pengurusan perizinan.

Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Pembinaan dan penyuluh* (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa langkah yang diberikan pemerintah daerah dalam mencari solusi dan pemecahan masalah yang dihadapi pelaku UKM adalah dengan cara memberikan pembinaan dan penyuluhan, agar pelaku UKM bisa menjalankan usahanya sebagaimana yang diharapkannya.

Hasil wawancara dengan Lila Purnama Sari, SE selaku Kasi Pengembangan dan Pembinaan UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Dinas akan memberikan saran untuk UKM dan jika memungkinkan juga berupa bantuan fisik (Barang)* (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)

Dalam memberikan pembinaan pemerintah daerah secara terus menerus memberikan solusi dan saran kepada pemilik UKM seperti Dinas akan

memberikan saran untuk UKM dan jika memungkinkan juga berupa bantuan fisik (Barang).

Wawancara dengan Saliyem salah seorang pemilik UKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah memberikan informasi bahwa;

*Solusi dari dinas berupa saran untuk bagaimana produk bisa segera dipasarkan dengan luas, dan bagaimana cara mengatasi kandungan sianida yang tinggi pada biji karet (Wawancara pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020)*

Informasi di atas memberikan penjelasan bahwa pemerintah telah memberikan solusi kepada pelaku UKM sesuai permasalahannya, seperti solusi dari dinas berupa saran untuk bagaimana produk bisa segera dipasarkan dengan luas, dan bagaimana cara mengatasi kandungan sianida yang tinggi pada biji karet. Solusi ini tentu akan memberi dampak baik untuk masa mendatang dalam upaya pengembangan UKM tersebut.

Wawancara dengan Misni pemilik UKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah diperoleh informasi berikut:

*Dinas pernah memberikan solusi berupa pengemasan yang lebih menarik dan dapat dipasarkan juga pada supermarket (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Informasi ini memberikan penjelasan bahwa pemerintah telah memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pelaku UKM, seperti pelaku UKM di atas mendapat solusi dari dinas berupa pengemasan yang lebih menarik dan dapat dipasarkan juga pada supermarket.

Wawancara dengan Siti Masriah Zunairi pemilik UKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah diperoleh informasi berikut:

*Solusi yang diberikan dinas berupa pinjaman modal dan beberapa alat. Dinas memberi saran agar pengemasan dapat lebih menarik agar dapat dipasarkan tidak hanya di warung-warung saja namun juga di mini market (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Solusi yang pernah diberikan pemerintah atas permasalahan yang dihadapi pelaku UKM di atas yakni pinjaman modal dan beberapa alat. Dinas memberi saran agar pengemasan dapat lebih menarik agar dapat dipasarkan tidak hanya di warung-warung saja namun juga di mini Market, sehingga wilayah pemasaran menjadi luas jangkauannya. Tentu dengan upaya pemasaran yang lebih besar akan membuka peluang jangkauan wilayah menjadi semakin luas dan besar juga.

Marwati pemilik UKM Aneka Keripik Singkong di Kecamatan Uku menyampaikan tanggapannya berikut:

*Untuk saat ini belum ada hanya sebatas arahan untuk seluruh pelaku UKM saja belum terkhusus ke pribadi (Wawancara pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020)*

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam pembinaan UKM pemerintah daerah telah berupaya memberikan beragam solusi, masukan kepada UKM dalam mengembangkan usahanya. Di mana salah satu solusi yang paling banyak adalah memberikan arahan agar memasarkan produknya lebih luas lagi dan mengurus perizinan seperti P.IRT dan Halal serta lainnya.

#### **e. Memberikan bantuan manajerial atau pengelolaan usaha**

Memberikan bantuan manajerial atau pengelolaan usaha adalah usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembinaan kepada UKM, sehingga UKM yang ada tidak hanya mampu memproduksi tetapi juga

mampu mengelola usaha secara profesional sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana diharapkan.

Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Bantuan permodalan, pengadaan bantuan saran dan program dan kementerian (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Tanggapan yang disampaikan ini memberikan penjelasan bahwa telah ada beragam bantuan manajerial dan pengelolaan usaha yang diberikan kepada pengusaha UKM. Di mana bantuan manajerial yang diberikan seperti manajemen produksi mulai dari menjaga mutu/kualitas produk sampai quality control atas produk yang dihasilkan, sehingga terjaminnya kualitas. Kemudian adanya manajerial untuk pemasaran produk dengan membuka pasar melalui penetapan merek, perizinan, pengemasan, harga yang sesuai, dan jangkauan wilayah pemasaran.

#### **f. Menjalin hubungan kerjasama atau kemitraan**

Menjalin hubungan kerja sama atau kemitraan telah diusahakan pemerintah daerah dengan beberapa lembaga untuk mendapatkan CSR pembinaan dan juga dengan lembaga seperti mini Market dalam mendapatkan tempat dipasarkannya produk UKM, serta dengan lembaga keuangan dalam memberikan bantuan permodalan seperti bank dan UED-SP dan sebagainya.

Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Pelaku usaha besar, perusahaan-perusahaan besar daerah dan masyarakat lainnya (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Tanggapan yang disampaikan informan memberikan informasi bahwa telah ada jalinan kerja sama dan kemitraan yang dilakukan pemerintah daerah dalam usaha membuka peluang dan kesempatan kepada UKM untuk tumbuh dan berkembang seperti adanya bantuan CSR dari perusahaan-perusahaan besar, adanya penyediaan tempat memasarkan produk di mini Market-mini Market, dan bantuan permodalan dengan mempermudah pengurusan izin bagi UKM untuk mendapatkan P.IRT dan bantuan lainnya.

Pengamatan lapangan yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa pemerintah daerah melalui Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan telah melakukan dorongan pemasaran kepada pelaku usaha dengan cara menjalin kerja sama dengan beberapa minimarket sebagai tempat memasarkan produk yang dihasilkan, kemudian menjalani kerja sama dengan beberapa lembaga keuangan seperti Bank maupun perusahaan untuk menyalurkan kerja sama CSRnya seperti Pertamina, RAPP, dan perusahaan lainnya sebagai mitra UKM.

Proses pembinaan UKM yang dilaksanakan pada pelaku usaha di Kecamatan Ukui pada tahun 2020 telah dilakukan pembinaan terhadap 8 pelaku UKM mendapatkan pelatihan, kemudian 1 pelaku usaha UKM mendapatkan sertifikat halal. Dengan begitu pada tahun 2020 hanya terdapat 7 pelaku UKM di Kecamatan Ukui yang mendapatkan pembinaan secara langsung dari pemerintah daerah. Sementara UKM lain yang belum mendapatkan pembinaan dikarenakan jumlah peserta pembinaan yang ditetapkan terbatas dan ada jenis usaha yang belum mendapat prioritas pembinaan. Selain itu dari segi pelaku UKM ada yang

belum mendaftarkan dirinya di tingkat Kecamatan sehingga tidak masuk dalam usulan untuk mendapatkan pembinaan.

Hasil temuan penelitian ini pada indikator proses dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan berbagai langsung oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan perkembangan UKM melalui berbagai pembinaan langsung, seperti adanya dorongan pemasaran, memberikan saran, menjalini kerja sama dan kemitraan, dan lain sebagainya yang tentunya membuka kesempatan untuk UKM tumbuh dan berkembang di Kecamatan Ukui.

### **3. Evaluasi**

Menurut Yusuf (2000:3) Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. Evaluasi dalam penelitian ini adalah serangkaian evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk perbaikan pembinaan pada masa akan datang. Di mana dengan adanya evaluasi atas berbagai kegiatan pembinaan mampu menumbuhkan ide baru dalam pembinaan UKM.

#### **a. Evaluasi Program Kerja**

Evaluasi program kerja adalah evaluasi atas program kerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, sehingga dapat dibandingkan antar hasil pelaksanaan pembinaan yang telah dilaksanakan dengan program yang menjadi sasaran pencapaian tujuan dalam pembinaan UKM.

Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Setiap tahunnya kami mengadakan evaluasi. Untuk program kerja pelaksanaan telah ditetapkan secara berkelanjutan sesuai dengan Renstra Dinas (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa Bidang UMKM telah melaksanakan evaluasi atas program kerja yang dijalani. Di mana evaluasi tersebut dalam bentuk pencapaian sasaran atas tujuan yang ditetapkan, dikarenakan program kerja yang dijalani secara berkesinambungan sesuai dengan rencana strategis dinas.

Begitu juga dengan tanggapan yang disampaikan Lila Purnama Sari, SE selaku Kasi Pengembangan dan Pembinaan UMKM berikut ini:

*Ada dilakukan evaluasi. Evaluasi program kerja ini lebih kepada pencapaian sasaran pembinaan (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Hasil di atas memberikan keterangan bahwa telah ada evaluasi yang dilakukan seksi pengembangan dan pembinaan atas program kerja yang dijalani. Di mana evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat jenis kegiatan yang dijalani apakah mampu mencapai sasaran dan tujuan, sehingga bila tercapai maka untuk tahun berikutnya akan dilakukan kegiatan yang sama tetapi bila tidak tercapai akan dilakukan kegiatan yang lain sesuai dengan program kerjanya.

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan terlihat dari laporan-laporan yang ada jenis kegiatan atas program kerja yang dilakukan dari tahun ke tahun tetap sama yakni melakukan pembinaan kepada UKM dengan jenis kegiatan yang berbeda. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya adalah

pemberian pembinaan dalam bentuk materi (pelatihan), pemberian dukungan untuk memperoleh izin, menjalin kerja sama dengan lembaga lain sebagai pendukung UKM seperti bantuan modal dan pembinaan.

#### **b. Evaluasi Metode Pembinaan**

Evaluasi metode pembinaan merupakan evaluasi atas program kerja yang dilakukan dengan metode atau cara yang dilaksanakan di lapangan untuk mencapai sasaran dan tujuan dari pembinaan.

Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Metode yang dilakukan selama ini yakni melakukan pendataan pelaku UMKM dan pembinaan langsung berupa pemberian atau peningkatan keterampilan serta pembinaan tidak langsung dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berpotensi mendukung UKM. (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa Bidang UKM telah melakukan evaluasi atas metode yang diterapkan dalam menjalani kegiatan. Di mana kegiatan yang telah dilaksanakan secara langsung dan kegiatan tidak langsung diberikan kepada pelaku UKM.

Begitu juga dengan tanggapan yang disampaikan Lila Purnama Sari, SE selaku Kasi Pengembangan dan Pembinaan UMKM berikut ini:

*Metode pembinaan selama ini metode langsung dan metode tidak langsung (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Hasil tanggapan yang disampaikan di atas memberikan gambaran bahwa metode pembinaan terhadap UKM yang selama ini dilakukan berupa metode langsung dan tidak langsung. Di mana metode langsung dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada UKM, sedangkan metode tidak langsung pembinaan

dengan memberikan kesempatan atau peluang kepada UKM untuk mendapatkan bantuan, tempat pemasaran, dan pembinaan dari pihak swasta.

Pengamatan yang peneliti perhatian terlihat metode pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan melakukan pembinaan secara langsung dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan, mengunjungi pelaku UKM, memberikan bantuan-bantuan dalam memperoleh perizinan atas produk, dan bentuk pembinaan langsung lainnya. Kemudian untuk pembinaan tidak langsung berupa menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak dalam hal membuka kesempatan mendapat bantuan (modal maupun dukungan pembinaan), kesempatan mendapatkan tempat pemasaran (minimarket).

### **c. Evaluasi Penerima Pembinaan**

Penerima pembinaan merupakan pelaku-pelaku UKM yang menjadi sasaran pembinaan dalam usaha untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat dan membuka kesempatan atau peluang mendapatkan penghasilan. Penerima pembinaan adalah orang-orang yang memiliki beragam keterampilan dan memiliki peluang untuk berkembang.

Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Setiap tahunnya sasaran dari pembinaan berbeda-beda, tetapi ada titik kesamaannya yakni UKM yang diusahakan oleh masyarakat baik dalam bentuk olahan makanan, kerajinan tangan, maupun jasa. (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa setiap tahunnya telah ditetapkan sasaran penerima pembinaan dari UKM yang berbeda-beda, sehingga

diharapkan mampu mencapai tujuan yakni terwujudnya UKM yang mampu bersaing dan berkembang.

Begitu juga dengan tanggapan yang disampaikan Lila Purnama Sari, SE selaku Kasi Pengembangan dan Pembinaan UMKM berikut ini:

*Beragam jenis UKM yang dijadikan sasaran untuk dibina. Mulai dari olahan pangan, kerajinan, tekstil, industri kecil, dan banyak lagi. Setiap tahunnya yang sasaran penerima pembinaan berkisar 2 sampai 3 jenis kategori UKM. (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Hasil di atas menjelaskan bahwa beragam jenis UKM yang telah dibina oleh pemerintah daerah. Di mana setiap tahunnya telah dilakukan pembinaan, sehingga evaluasi penerima secara terus menerus dilakukan agar semua UKM yang ada mampu terfasilitasi untuk mendapatkan pembinaan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas terkait menysasar pada berbagai jenis dan bentuk UMKM yang ada, sehingga semua jenis dan bentuk UMKM yang mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa pemerintah telah melakukan pembinaan kepada UKM dengan beragam jenis dan kriteria usaha yang digelar pengusaha.

#### **d. Evaluasi Anggaran**

Evaluasi anggaran adalah evaluasi atas penggunaan anggaran dan kecukupan anggaran yang dislokasi untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat pelaku usaha UKM. Di mana di sini anggaran yang disediakan untuk pembinaan setiap tahunnya telah dialokasikan sesuai dengan keputusan Dinas.

Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Evaluasi atas anggaran hanya dalam bentuk ketercukupan dana untuk melakukan pembinaan (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Begitu juga dengan tanggapan yang disampaikan Lila Purnama Sari, SE selaku Kasi Pengembangan dan Pembinaan UMKM berikut ini:

*Anggaran yang dievaluasi tentang besaran serapan dana yang dislokasi dengan kegiatan pembinaan (Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020)*

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan terlihat bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam mengembangkan dan pembinaan UMKM telah menetapkan berbagai program dan hasil yang hendak dicapainya. Adapun bentuk program pembinaan yang telah ditetapkan yakni: Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM, dengan jenis kegiatan yakni:

- Meningkatkan kemitraan usaha bagi UMKM
- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
- Tekno *preneurship camp* (menumbuh kembangkan wirausaha baru)
- Pameran produk unggulan khas daerah
- Pelatihan keterampilan kerajinan
- Pengembangan usaha ekonomi dalam pemantapan sentra UMKM
- Tema usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) dengan dunia usaha.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat memanfaatkan UMKM untuk pengentasan kemiskinan di daerahnya. Untuk itu pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui kewenangan pembuatan peraturan bisa memberdayakan UMKM. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan UMKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pelalawan harus menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya.

Dalam hal ini pemerintah dapat mendorong agar dalam menilai UMKM bisa dilihat dari kelayakan usaha dan bukan hanya atas dasar agunan. Pemerintah dapat mendorong agar UMKM membangun kemitraan dengan usaha besar dalam semangat saling menguntungkan. Pemerintah Daerah harus mampu membuat sosialisasi dan penyadaran kepada berbagai unsur yang terlibat dalam dunia usaha di daerah mereka masing-masing. Tentu pemerintah Kabupaten Pelalawan harus mempersiapkan forum dialog antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Kualitas SDM UMKM rata-rata rendah dan pemerintah dalam hal ini dapat melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha UMKM, mulai dari pelatihan motivasi, produksi, kemasan, pemasaran hingga pembuatan laporan keuangan. Dengan demikian, pendekatan pembangunan SDM akan diprioritaskan dalam upaya memasyarakatkan dan membudayakan Kewirausahaan khususnya dalam rangka pengembangan dan pembinaan UMKM di Kabupaten Pelalawan.

Pengamatan yang penulis perhatian pada indikator evaluasi ini, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan setiap tahunnya selalu melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja terutama pada pembinaan UKM yang ada, sehingga dengan adanya evaluasi bisa diketahui kelemahan dan kekuatan serta tantangan dari program kerja yang dijalani. Di mana hasil evaluasi khusus pada UKM bidang pangan masih sedikitnya jumlah UKM yang baru mengurus dan mendapatkan izin baik itu PIRT maupun izin halal, sehingga untuk kedepannya program perizinan dari produk UKM yang harus menjadi fokus selain pembinaan dalam bentuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan.

Hasil penelitian pada indikator evaluasi ini dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan evaluasi pada kegiatan pembinaan yang dijalankan, sehingga menjadi bahan untuk perbaikan pada program berikutnya. Melalui evaluasi ini menjadi landasan bagi dinas dalam menyusun program kerja berupa rencana aksi pada tahun-tahun berikutnya untuk memberikan pembinaan yang efektif kepada UKM.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembinaan UKM yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemerintah telah melaksanakan pembinaan kepada UKM yang ada, walaupun belum menjangkau seluruh UKM tetapi telah ada program pembinaan yang dilakukan. Dengan demikian pembinaan yang dilakukan belum menjangkau seluruh UKM dan

program pembinaan yang dijalani masih sebatas pelatihan, penyuluhan, pemberian solusi, dan kemitraan.

## **B. Hambatan dan Pendukung Pembinaan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan pada UMKM di Kecamatan Ukui**

### **a. Faktor Penghambat**

Adapun faktor penghambat dalam pembinaan UKM di Kecamatan Ukui yang dilakukan pemerintah daerah serta hambatan yang terdapat pada pemilik UKM, sehingga UKM kurang berkembang dan masih belum mampu tumbuh dan membesar sebagaimana diharapkan.

Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Minat dan bakat dari masyarakat pelaku UMKM, konsultasi dan keseriusan (Wawancara pada hari Senin tanggal 12 Desember 2020)*

Dari pemerintah daerah faktor penghambat tumbuh berkembangnya UKM adalah adanya minat dan bakat dari masyarakat UKM yang tidak serius dalam menjalankan usahanya, sehingga UKM tidak berkembang. Kurangnya konsultasi dan keseriusan dari pemilik UKM dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak ditemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam usahanya.

Wawancara dengan Saliyem salah seorang pemilik UMKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah memberikan informasi bahwa;

*Faktor pengambatnya saya masih belum dapat sepenuhnya memasarkan produk dengan menyeluruh terkendali pada sedikit kandungan sianida yang masih terdapat pada biji karet (Wawancara pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020)*

Kendala teknis menjadi faktor penghambat berkembangnya usaha pengolahan pangan dari biji karet, yakni masih belum mampu sepenuhnya mengurangi atau menghilangkan kadar sianida yang melekat dibiji karet. Hal ini butuh kerja keras untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan tidak ada efek samping yang masih melekat dari bahan baku yang digunakan.

Wawancara dengan Misni pemilik UMKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah diperoleh informasi berikut:

*Untuk pengemasan dan ukuran seperti ini masih membutuhkan modal yang besar, dan juga harga produk menjadi lebih mahal sehingga tidak bisa mencapai semua kalangan (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Kendala yang dihadapi pelaku usaha yakni pengemasan dan ukuran seperti ini masih membutuhkan modal yang besar, dan juga harga produk menjadi lebih mahal sehingga tidak bisa mencapai semua kalangan.

Wawancara dengan Siti Masriah Zunairi pemilik UMKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah diperoleh informasi berikut:

*Faktor penghambat yang besar saya rasa tidak ada. Hanya saja saya belum mampu mengikuti arahan dinas untuk mengganti kemasan dan menjual ke mini market (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Ahmad Sofari pemilik UMKM yang belum pernah mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pelalawan memberikan informasi bahwa:

*Faktor penghambat usaha saya masih terbilang baru dan masih kecil, sehingga untuk pemasarannya masih terbatas (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Marwati pemilik UMKM Aneka Keripik Singkong di Kecamatan Ukui menyampaikan tanggapannya berikut:

*Belum dapat kode P.IRT dan label halal karena proses pengurusan nya belum selesai di dinas (Wawancara pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020)*

Berdasarkan tanggap yang disampaikan informan di atas memberikan penjelasan terdapat beragam faktor yang menjadi penghambat dalam berkembangnya sebuah UKM yakni: seperti kurangnya wilayah pemasaran, belum adanya kode P.IRT dan label halal yang diperoleh, belum mampu membuat atau mengemas produk dengan baik atau menarik. Serta ada beberapa penghambat dalam pengolahan produk yang dihasilkan, sehingga belum mampu dipasarkan secara luas.

#### b. Faktor Pendukung

Terdapat beberapa faktor pendukung yang dimiliki para pengusaha maupun instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada UMKM. Hasil wawancara dengan Jufri, S.Kom selaku Kasi Sarana dan Prasarana UMKM diperoleh informasi bahwa:

*Adanya alokasi anggaran, masyarakat pendukung UMKM (Wawancara pada hari Senin tanggal 12 Desember 2020)*

Faktor yang mendukung pembinaan UKM di Kabupaten Pelalawan adalah adanya alokasi anggaran yang dipersiapkan setiap tahunnya, sehingga tidak ada alasan UKM yang ada di Pelalawan tidak mampu berkembang dan tidak mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.

Wawancara dengan Saliyem salah seorang pemilik UMKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah memberikan informasi bahwa;

*Faktor pendukungnya saya selalu memenangkan perlombaan dengan mengenalkan produk saya ini, dan juga peminatnya cukup banyak, untuk kedepannya mungkin sudah dapat dipasarkan dengan luas karena kandungan sianidanya sudah dapat dihilangkan (Wawancara pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020)*

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa faktor pendukungnya saya selalu memenangkan perlombaan dengan mengenalkan produk saya ini, dan juga peminatnya cukup banyak, untuk kedepannya mungkin sudah dapat dipasarkan dengan luas karena kandungan sianidanya sudah dapat dihilangkan.

Wawancara dengan Misni pemilik UMKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah diperoleh informasi berikut:

*Faktor pendukung misalnya saja alat-alat yang sudah memadai, dan karyawan dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, serta permintaan pasar (warung) yang lumayan tinggi (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Wawancara dengan Siti Masriah Zunairi pemilik UMKM yang pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah diperoleh informasi berikut:

*Faktor pendukungnya alat-alat yang sudah memadai, permintaan pasar, dan kualitas produk juga diperhatikan (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Ahmad Sofari pemilik UMKM yang belum pernah mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pelalawan memberikan informasi bahwa:

*Faktor pendukungnya adalah banyaknya permintaan pelanggan dari pasaran, saya juga menjaga kualitas tahu yang saya buat (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021)*

Marwati pemilik UMKM Aneka Keripik Singkong di Kecamatan Ukui menyampaikan tanggapannya berikut:

*Faktor pendukung hanya berupa permintaan dari peminat yang lumayan tinggi sehingga menjadi motivasi sendiri bagi saya untuk lebih baik lagi, dan segera mendapatkan P.IRT (Wawancara pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020)*

Tanggapan di atas memberikan gambaran beragam faktor yang mendukung aktivitas UKM yang ada di Kecamatan Ukui, sehingga UKM yang ada ini mampu tumbuh dan berkembang. Di mana faktor yang paling besar adalah tingginya permintaan masyarakat atas beragam produk yang dihasilkan para pengusaha UKM, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya semakin meningkat serta mampu membuka peluang untuk meningkatnya perekonomian dari pengusaha UKM tersebut.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Di Kecamatan Ukui) sudah dilaksanakan sesuai dengan diharapkan. Di mana dalam pembinaan telah ditetapkan tindakan pembinaan berupa adanya ditetapkan rencana kerja, rencana aksi, program kerja, dan alokasi anggaran. Kemudian proses untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya UKM telah dilakukan dengan adanya dorongan pengembangan pemasaran, mempermudah bantuan modal, meningkatkan kualitas SDM, memberikan solusi atau jalan keluar bagi UKM, memberikan bantuan manajerial atau pengelolaan usaha, dan menjalin hubungan kerja sama. Sedangkan dari evaluasi atas pembinaan yang telah dijalani sudah dijalani dengan melakukan perbaikan untuk masa mendatang terutama dari jenis kegiatan dan penerima pembinaan.

Hambatan pembinaan UKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan berupa minat dan inovasi pelaku usaha, fasilitas pendukung pelaku usaha. Sementara dari pelaku UKM masih belum mengembangkan wilayah pemasaran, belum adanya pengurusan kode P.IRT dan label halal, belum mampu membuat atau mengemas produk dengan baik atau menarik.

## B. Saran-saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan hendaknya membina pelaku usaha dengan memotivasi pelaku usaha melalui berbagai program pembinaan yang bisa memunculkan minat kewirausahaan dan inovasi pelaku usaha.
2. Pemerintah Daerah hendaknya menyediakan berbagai ruang pemasaran bagi pelaku usaha UKM agar hasil produksi yang dibuat bisa dipasarkan ke masyarakat secara langsung.
3. Bagi pelaku usaha UKM hendaknya terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan memasarkan produk.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Rozali, 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. dkk. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Beratakusumah, Deddy Supriadi, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cresswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Cresswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Riset. Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, Mahrizal. 2003. *Pembinaan Ekonomi dan budaya Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Garna, Judistira K., 1999. *Metoda Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Bandung: Primaco Akademika
- Handyaningrat. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Ibrahim, Amin. 2004. *Pokok-Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali.
- Labolo, Muhadam, 2015. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Miles, Matthew & Huberman, A Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy, J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nafarin, M. 2009. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1. Jakarta; Rineka Cipta
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2000. *Nasionalismen dan Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Editor Sri Maulidiah. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta,
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Thoha, Miftah. 2004. *Perilaku Organisasi – Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Widjaja, A.W. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, Farida. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta

#### **Dokumentasi :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

**Jurnal:**

Maulana Ibrahim. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda). *eJournal Ilmu Pemerintahan* Vol 4 No. 1 Tahun 2016.

Muh. Ridwan, Hartutiningsih, Mass'ad Hatuwe. Pembinaan Industri kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang. *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014.

Nanang Suparman, Dina Fitra Sulistia, Syamsir, Engkus. Peranan Pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat Dalam Memajukan Perkoperasian di Daerah. *JAP* Vol. 7 No. 2 Tahun 2019

**Website/Internet:**

<https://sukabumikab.go.id/portal/tinymcpuk/gambar/file/disnakertrans/RENCANA%20AKSI%20KINERJA%20REVISI.pdf> (diakses tanggal 22 Maret 2021)